

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A'an Efendi FreddyPoernomo. 2017. *Hukum Administrasi*. Jakarta Timur; Sinar Grafika.

Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta; Prenadamedia Group.

Bagir Manan. 2017. *Bentuk-Bentuk Perbuatan Keperdataan Yang Dapat Dilakukan oleh Pemerintah Daerah*. Jakarta; Majalah Ilmiah Universitas Padjadjaran, No. 3, Vol. 14.

Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung; Mandar Maju.

Dadang Suwanda. 2014. *Dana Hibah & Bantuan Sosial Pemerintah Daerah*. Jakarta; Penerbit PPM.

Ediwarman. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Medan; PT. Sofmedia.

Fajlurrahman Jurdi. 2016. *Teori Negara Hukum*. Malang; Setara Press.

Haw Wijaya. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.

H. Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung; CV Alfabeta.



to. 2003. *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta; Pustaka Sinar Harapan.

ah dan Ahsan Yunus. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan*

Praktik Artikel. Yogyakarta; Mirra Buana Media.

Lexi Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung; PT. Remaja Rosdakarya.

Masriani. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta; Sinar Grafika.

Miriam Budiardjo. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama.

Mr. S Prajudi Atmosudirjo. 1995. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta; Ghalia Indonesia Cetakan kesepuluh.

Nomensen Sinamo. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta; Jalan Permata Aksara.

Ridwan HR. 2017. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta; Rajawali Pers.

Saidi M. Djafar. 2016. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta; Raja Grafindo.

S.F.Marbun. 2004. *Dimensi-Dimensi Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta; UII Press.

Stout HD. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung; Alumni.

Surayin. 2005. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung; Yrama Widya.

Tjandra. W. Riawan. 2014. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta; Grasindo.

Jurnal dan Skripsi



J Inggit AR. 2019. *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah*,

Jurnal Restorative Justice. Fakultas Hukum Unhas.

Agus Budi Susilo, 2015, "Makna dan Kriteria Diskresi Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Publik dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik" , *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 4, Nomor 1.

Aristono, *Tindakan Hukum Diskresi dalam Konsep Welfare State Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam*, Jurnal Penelitian, Volume 8, Nomor 2.

Nunik Nugrahaeni. "*Dampak Hibah Pariwisata Terhadap Kinerja Industri Pariwisata Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta*". Jurnal Akuntansi. Ekonomi dan Manajemen Bisnis. Vol. 9. Nomor 2.

Fadlan Alfian. "*Analisis Tentang Pembatalan Hibah yang Sudah Diberikan Menurut KUHPperdata (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 112/Pdt.G/2014/pn/jmr)*". Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.

I Gusti Agung Istri Rai Dhamma Astuti Utami. "*Implementasi Penyaluran Dana Hibah Kepada Kelompok Masyarakat di Kabupaten Badung*". Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Aulia Utami Putri. "*Pengelolaan Pemberian Dana Hibah*". Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Sriwijaya.



Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tentang Kepariwisatawan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang – Undang.

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisa Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.

Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor KM/704/PL.07.02/M-K/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor Km/694/PI.07.02/M-K/2020 Tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun



Anggaran 2020.

Surat Menteri Keuangan Nomor : S-244/MK.7/2020 Tanggal 7 Oktober
2020 tentang Penetapan Pemberian Hibah Pariwisata TA 2020.

Peraturan Walikota Makassar Nomor 103 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Pariwisata.

Sumber Internet

[https://sulawesi.bisnis.com/read/20210204/540/1352430/kisruh-dana-
hibah-pariwisata-di-makassar-memasuki-babak-baru](https://sulawesi.bisnis.com/read/20210204/540/1352430/kisruh-dana-
hibah-pariwisata-di-makassar-memasuki-babak-baru)

[https://makassar.sindonews.com/read/295118/711/dana-hibah-pariwisata-
masih-di-kas-daerah-pencairan-tunggu-petunjuk-pusat-
1610146880](https://makassar.sindonews.com/read/295118/711/dana-hibah-pariwisata-
masih-di-kas-daerah-pencairan-tunggu-petunjuk-pusat-
1610146880)

[https://m.merdeka.com/amp/peristiwa/dana-hibah-tidak-cair-pelaku-
usaha-hotel-dan-restoran-di-makassar-datangi-dprd.htm](https://m.merdeka.com/amp/peristiwa/dana-hibah-tidak-cair-pelaku-
usaha-hotel-dan-restoran-di-makassar-datangi-dprd.htm)



LAMPIRAN

Surat Keterangan



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makassar 90171
Website: dpmptp.makassar.go.id



SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor: 070/810/SKP/SB/DPMTSP/12/2023

DASAR:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Keterangan Penelitian.
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan
- Keputusan Walikota Makassar Nomor 954/503 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun 2023
- Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor 070/810/SKP/SB/DPMTSP/12/2023, Tanggal 01 November 2023
- Rekomendasi Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar nomor 815/SKP/SB/BKBP/12/2023

Dengan Ini Menerangkan Bahwa :

Nama	: ANDRIAN YASRI ARIEF
NIM / Jurusan	: B021171006 / Hukum Administrasi Negara
Pekerjaan	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar
Lokasi Penelitian	: Terlampir,-
Waktu Penelitian	: 01 November 2023 - 26 Januari 2024
Tujuan	: Skripsi
Judul Penelitian	: "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PEMBERIAN DANA HIBAH PARIWISATA DI KOTA MAKASSAR"

Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan selama waktu yang sudah ditentukan dalam surat keterangan ini.
- Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul dan tujuan kegiatan penelitian.
- Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melalui email bidangpoldagrikesbangpolmks@gmail.com.
- Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas.



Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal: 2023-12-11 12:09:36



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR**
A. ZULKIFLY, S.STP., M.SI.



Surat Keterangan

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS HASANUDDIN FAKULTAS HUKUM Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan Telp : (0411) 587219, 546686, Website: https://lawfaculty.unhas.ac.id	
Nomor	: 8852/UN4.5.1/PT.00/2022	Makassar, 11 Oktober 2022
Lampiran	: -	
Hal	: PENELITIAN	
Kepada		
Yth.	: Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sul Sel di- TEMPAT	
Dengan hormat,		
Disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Unhas :		
Nama	: ANDRIAN YASRI ARIEF	
No. Pokok	: B021171006	
No. HP	: 082158427820	
Prog. Studi	: Hukum Administrasi Negara	
Alamat	: SUNGGUMINASA	
Pembimbing	: 1. Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin ,SH.,MH 2. Dr. Andi Bau Inggit AR. ,SH., M.H.	
Akan menyusun Skripsi yang merupakan bagian dari kurikulum Fakultas Hukum Unhas. Untuk itu, mohon kiranya mahasiswa yang bersangkutan dibantu/difasilitasi untuk mendapatkan data/informasi yang berhubungan dengan penyusunan Skripsi yang berjudul :		
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PEMBERIAN DANA HIBAH PARIWISATA DI KOTA MAKASSAR		
Demikian Surat Pengantar penelitian ini, atas bantuan dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.		
		 Dr. Markum, SH.,LL.M Nid. 19751129 199903 1 005
Tembusan :		
1. Dekan Fakultas Hukum Unhas;		
2. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Unhas;		

#generated_by_law_information_system_fh-uh in 2022-10-11 08:27:33

1 dari 1

11/10/2022 08.21

CS Dipindai dengan CamScanner



Surat Keterangan



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS PARIWISATA

Jl. Urip Sumoharjo No. 58, Makassar 90144. Phone/Fax : 0411 - 424 832
[E : mksombere@gmail.com] - [T : @mks_sombere] - [W : www.tourism-makassar.id]
Facebook Fanpage: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 12888/DISPAR/008/XII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Roem, S.STP., M.Si**
Nip : 19831110 200212 1 001
Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IVb
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar

Menerangkan bahwa mahasiswa(i) di bawah ini :

Nama : **ANDRIAN YASRI ARIEF**
NIM / Jurusan : B021171006 / Hukum Administrasi Negara
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan kegiatan Penelitian di Dinas Pariwisata Kota Makassar pada tanggal 27 Desember

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 27 Desember 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Pariwisata



Muhammad Roem, S.STP., M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 19831110 200212 1 001



Dipindai dengan CamScanner